

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara demokrasi, yang menjadikan kepentingan rakyat merupakan hal yang utama. Negara demokrasi, biasanya mempunyai semboyan “dari rakyat untuk rakyat”. Salah satu kepentingan rakyat adalah mempunyai seorang pemimpin, baik dalam lingkup kecil maupun lingkup besar. Dalam lingkup demokrasi seorang pemimpin haruslah dipilih langsung oleh orang-orang yang akan dipimpinya. Dalam mewujudkan demokrasi yang baik dan benar, Indonesia melakukan pemilihan seorang pemimpin dengan cara Pemilihan Umum (Pemilu), Indonesia mempunyai empat macam pemilihan, yaitu Pemilihan Presiden, Pemilihan Legislatif, Pemilihan Gubernur, dan Pemilihan Bupati/Walikota. Menurut Zuly Qodir (2016: 1) pemilihan umum sebenarnya merupakan sebuah implementasi dari ciri-ciri demokrasi. Dimana rakyat dilibatkan secara langsung untuk turut andil dalam memilih calon wakil rakyat yang akan memimpin. Tingkat kesuksesan pemilu biasanya dapat dilihat dari partisipasi politik masyarakat, dengan partisipasi politik tersebut masyarakat secara tidak langsung sebagai pengontrol jalannya pemerintahan. Kontrol yang dilakukan masyarakat berbeda-beda tergantung seberapa besar masyarakat ikut berpartisipasi politik. Ada berbagai bentuk partisipasi politik, seperti diskusi politik, berdemonstrasi, pengajuan petisi, mengikuti kampanye dan pemberian suara atau voting.

Penulis memilih bentuk partisipasi politik dalam hal pemberian suara atau voting dalam Pemilu, sebab partisipasi politik yang mudah untuk dilihat adalah melalui perhitungan persentase masyarakat yang menggunakan hak pilihnya (*voter turnout*), dibandingkan dengan masyarakat yang berhak memilih (Budiarjo, 2008: 375).

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) muncul setelah diberlakukannya Undang-undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dimana dalam Undang-undang No.32 Tahun 2004 pada pasal 56 (1) berbunyi “Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.” Diadakannya pilkada biasanya menjadi tolok ukur untuk mengukur tingkat partisipasi politik masyarakat di tingkat lokal.

Dalam proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tentunya dibutuhkan partisipasi dari masyarakat, agar tercipta kedaulatan dalam bernegara. Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sangat berbeda-beda ada yang tingkat partisipasinya tinggi dan ada yang partisipasinya rendah, hal ini biasanya dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Masyarakat yang mau ikut berpartisipasi biasanya berkeyakinan bahwa dengan berpartisipasi dalam kegiatan politik, maka kepentingan atau kebutuhan mereka setidaknya akan didengar dalam hal mengambil sebuah keputusan.

Masyarakat memiliki hak penuh dalam mengikuti proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tersebut tanpa terkecuali masyarakat Kota Yogyakarta, yang

notabene Kota Yogyakarta terkenal dengan sebutan kota pelajar. Dengan adanya sebutan kota pelajar orang pasti menilai bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat kota Yogyakarta tinggi. Sebab seperti yang kita ketahui semakin tingginya pendidikan seseorang, maka seseorang tersebut pasti akan mengerti pentingnya turut andil dalam Pemilihan Umum (Pemilu). Dalam hal ini Pemilihan Umum (Pemilu) yang dimaksud ialah Pemilihan Walikota.

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Yogyakarta yang dilakukan pada tanggal 15 Februari 2017, menjadi bagian dari pelaksanaan Pilkada secara serentak se-Indonesia. Yogyakarta juga turut andil dalam pemilihan umum serentak tersebut, seperti di Kulon Progo yang melakukan Pemilihan Bupati dan Kota Yogyakarta melaksanakan Pemilihan Walikota. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dalam pilkada serentak 2017 ini dilakukan secara langsung. Ada 794 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di 14 Kecamatan dan jumlah pemilih di Kota Yogyakarta ada 302.014 pemilih, sedangkan yang menggunakan hak pilih 213.834 orang. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota ini diikuti 2 (dua) orang paslon Walikota dan Wakil Walikota, yang masing-masing diusung partai-partai politik. Pasangan yang menjadi calon Walikota dan Wakil Walikota adalah: 1.) Imam Priyono Putranto – Achmad Fadli dan; 2.) Haryadi Suyuti – Heroe Poerwadi. Paslon No 2 diusung oleh Partai Golkar, PAN, Gerindra, Demokrat, PKS, dan PPP. Sedangkan Paslon No 1 diusung oleh Partai Nasdem, PDIP, dan PKB. Pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Yogyakarta tahun 2017 dimenangkan oleh Pasangan Calon (Paslon) No 2 Haryadi Suyuti - Heroe Poerwadi yang diusung oleh Partai

Golkar, PAN, Gerindra, Demokrat, PKS, dan PPP. Kemenangan mereka tidak semata-mata karena partai politik yang mengusungnya melainkan juga karena partisipasi politik dari masyarakat.

Partisipasi masyarakat Kota Yogyakarta dalam Pemilihan Walikota Tahun 2017 ini meningkat dibandingkan pada pemilihan tahun 2011 yang lalu, seperti yang dilansir dalam **tribunnewsjogja**, komisioner KPU Divisi Sosialisasi Sri Surani atau yang akrab disapa Rani berujar, bahwa tingkat partisipasi yang ditargetkan pada tahun 2017 ini adalah sebesar 67,5 persen. Ternyata dalam pilkada Walikota Kota Yogyakarta tahun 2017 partisipasinya mencapai 70,8 persen. Mengingat situasi di berbagai kota besar yang mengikuti pilkada serentak, tingkat partisipasinya menurun.

Dicatat dari data yang ada dalam website KPU DIY partisipasi pemilih dari Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang sebelumnya. Kota Yogyakarta sebagai salah satu wilayah yang mendata setiap pemilu yang dilaksanakan, khususnya angka partisipasi masyarakat Kota Yogyakarta. Lebih jelasnya sebagai berikut data yang tersaji dalam hal partisipasi pemilih dalam Pemilihan Walikota Kota Yogyakarta tahun 2011 dan 2017.

Tabel 1.1

Hasil Perhitungan suara Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pilkada (Walikota) Keseluruhan Tahun 2011/2017.

Tahun	Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Pengguna Hak Pilih	Tidak menggunakan Hak Pilih	Partisipasi
--------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------------------------	--------------------

2011	322.872	208.132	114.740	64,46 %
2017	302.014	213.834	88.180	70,80 %

Sumber : kpu.go.id (diakses pada 8 November 2018)

Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pilkada Kota Yogyakarta tahun 2011 tertulis daftar pemilih tetap (DPT) yaitu sebesar 322.872 pemilih, yang menggunakan hak pilihnya sebesar 208.132, sedangkan yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 114.740 pemilih, dan partisipasi masyarakat Kota Yogyakarta pada tahun 2011 sebesar 64,46 %, lalu pada tahun 2017 tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada Kota Yogyakarta daftar pemilih tetap sebanyak 302.014 pemilih, yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 213.834 pemilih, dan yang tidak menggunakan hak pilihnya ada 88.180 pemilih, serta angka partisipasinya sebesar 70,80 %. Dengan adanya data di atas maka kita dapat melihat bahwa tingkat partisipasi masyarakat Kota Yogyakarta dalam Pilkada tahun 2017 meningkat dibandingkan dengan tahun 2011. (KPU DIY)

Kecamatan yang ada di Kota Yogyakarta terdiri dari : Mantrijeron, Kraton, Mergangsan, Pakualaman, Gondomanan, Ngampilan, Wirobrajan, Gedongtengen, Jetis, Tegalrejo, Danurejan, Gondokusuman, Umbulharjo, dan Kotagede. Dari 14 Kecamatan yang ada di wilayah Kota Yogyakarta, ada salah satu kecamatan yang tingkat persentase partisipasi masyarakatnya meningkat paling tinggi dibandingkan dengan kecamatan yang lain yang ada di Kota Yogyakarta, ialah Kecamatan Tegalrejo sekitar 9 %. Kecamatan Tegalrejo

sendiri memiliki empat kelurahan, yaitu Kelurahan Kricak, Kelurahan Karangwaru, Kelurahan Tegalorejo, dan Kelurahan Bener.

Data yang tercatat di website KPU DIY partisipasi pemilih dalam Pilkada (Walikota) di Kecamatan Tegalorejo pada tahun 2017 lebih tinggi dibandingkan pada Pilkada tahun 2011, hal ini akan disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 1.2

Hasil perhitungan suara Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pilkada (Walikota) di Kecamatan Tegalorejo Tahun 2011/2017

Tahun	Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Pengguna Hak Pilih	Tidak Menggunakan Hak pilih	Partisipasi
2011	29.412	18.705	10.707	63,6 %
2017	26.531	19.255	7.276	72,6 %

Sumber : kpu.go.id (8 November 2018)

Tingkat Partisipasi warga Kecamatan Tegalorejo pada tahun 2011 yang tercatat dalam daftar pemilih tetap ialah sebanyak 29.412 pemilih, warga yang menggunakan hak pilihnya sebesar 18.705 pemilih sedangkan warga yang tidak menggunakan hak pilihnya ialah 10.707 pemilih, dan angka partisipasi masyarakatnya menunjukkan angka sebesar 63,6 %. Pada tahun 2017 daftar pemilih tetap yang tercatat ialah 26.531 pemilih, yang menggunakan hak pilihnya 19.255 pemilih, sedangkan yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 7.276 pemilih, lalu tingkat partisipasi masyarakatnya sebesar 72,6 %. Hal ini menunjukkan bahwa di Kecamatan Tegalorejo terdapat peningkatan dalam hal

partisipasi politik dalam Pemilihan Walikota (Pilwali) tahun 2017 dibandingkan dengan tahun 2011.

Kecamatan Tegalrejo termasuk kedalam daerah perkotaan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Tidak hanya kecamatan tegalrejo yang tergolong daerah perkotaan, ada juga kecamatan lain seperti: Kecamatan Depok yang berada di Kabupaten Sleman dan Kecamatan Banguntapan yang berada di Kabupaten Bantul. Partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Tegalrejo yang merupakan daerah perkotaan tergolong tinggi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dibandingkan dengan Kecamatan Depok dan Kecamatan Banguntapan. Hal ini dapat dilihat dari tabel yang akan disajikan dibawah ini.

Tabel 1.3

Perbandingan Hasil Perolehan Suara dalam Pilkada Tahun 2017 dan 2015 di Kecamatan yang termasuk Daerah Perkotaan di DIY

Tahun Pelaksanaan Pilkada	Kecamatan	Pengguna Hak Pilih	Persentase Partisipasi Politik Masyarakat
2017	Tegalrejo	19.255	72,6 %
2015	Banguntapan	52.213	69,7 %
2015	Depok	54.683	62,6 %

Sumber : kpu.go.id (diakses pada 23 November 2019)

Tingkat partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Tegalrejo dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2017 yang tercatat menggunakan hak pilihnya ialah sebanyak 19.255 pemilih, dan tingkat persentase partisipasi

masyarakat menunjukkan angka sebesar 72,6 %. Kecamatan Banguntapan tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada tahun 2015 yang menggunakan hak pilihnya ialah sebesar 52.213 pemilih dan persentase partisipasinya menunjukkan nilai 69,7 %. Sedangkan di Kecamatan Depok dalam Pilkada tahun 2015 masyarakat yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 54.683 pemilih dan persentase pemilihnya menunjukkan angka sebesar 62,6 %. Hal ini menunjukkan bahwa dari data diatas dapat dilihat di Kecamatan Tegalrejo yang merupakan kecamatan yang berada di daerah perkotaan, tetapi masyarakatnya masih mempunyai tingkat partisipasi yang tinggi dibandingkan dengan Kecamatan Banguntapan dan Kecamatan Depok.

Secara logika, ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat Kecamatan Tegalrejo menjadi aktif berpartisipasi dalam pemilihan walikota, baik itu faktor intenal maupun faktor eksternal. Hal ini yang menjadikan alasan mengapa penulis memilih judul *“Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Kota Yogyakarta dalam Pemilihan Walikota Kota Yogyakarta Tahun 2017 di Kecamatan Tegalrejo”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan yang telah dipaparkan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah yang diambil penulis adalah : Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan meningkatnya partisipasi masyarakat Kota Yogyakarta khususnya di Kecamatan Tegalrejo ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian, ialah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi meningkatnya partisipasi politik masyarakat Kecamatan Tegalorejo.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan oleh peneliti adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pemerintahan khususnya dalam ilmu politik, khususnya dalam hal faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat.

2. Manfaat Praktis

a. Sebagai referensi dan bahan bacaan bagi pihak yang memerlukan dan dapat menjadi bahan acuan penelitian dalam membahas topik atau tema yang sama dalam penelitian selanjutnya.

b. Dapat dijadikan sebagai kajian bagi pemerintah Kota Yogyakarta atau Walikota Yogyakarta untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam setiap pemilihan walikota dan wakil walikota.

E. Literature Review

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Syaiful Huda (2014) yang berjudul 'Partisipasi Masyarakat dalam Pemilukada 2012 di Kabupaten Pati

(studi kasus di Desa Tegalarjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati)' menyimpulkan bahwa masyarakat di Tegalarjo memiliki partisipasi yang cukup tinggi dalam Pilkada tahun 2012 yang lalu, partisipasi masyarakat Tegalarjo masih banyak yang dipengaruhi oleh *money politics* (politik uang). Ada 76 % partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh faktor *money politics*, sedangkan faktor hubungan paslon (pasangan calon) dengan masyarakat hanya 4 %. Sebenarnya masyarakat Desa Tegalarjo juga menginginkan pemilu yang terbebas dari *money politics*, tetapi kalau terjadi bagi-bagi uang yang dilakukan oleh pasangan calon masyarakat Desa Tegalarjo mau menerimanya. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Tegalarjo tidak konsisten.

Penelitian yang berjudul 'Pemilu dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Calon Wakil Presiden Di Kabupaten Minahasa Tahun 2014' oleh Daud M Liando (2016), menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu tahun 2014 adalah kurangnya sosialisasi panitia *ad hoc* yang masih lemah kepada masyarakat, selain itu juga dikarenakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap calon anggota legislatif yang mencalonkan diri, ketidakpercayaan masyarakat itu dalam hall janji-janji politik pada saat kampanye serta tidak tertarik terhadap visi dan misi yang disajikan oleh calon anggota legilatif.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Gamelly Octavia (2015) yang berjudul 'Partisipasi Politik Masyarakat Kota Pekanbaru pada Pemilihan Umum Kepada Daerah Tahun 2013 (studi evaluasi RW 11 Kelurahan Tuah Karya

Kecamatan Tampan)’ menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat masih terbilang rendah hal ini disebabkan adanya faktor faktor, seperti cara berkampanye pasangan calon, popularitas paslon, serta media massa sebagai penunjang untuk menginformasikan calon kepala daerah yang mencalonkan diri dan bagaimana peranan KPU Kota Pekanbaru dinilai masih kurang dalam memberikan informasi kepada masyarakat.

Ilma Nur Amalia (2015) dalam penelitiannya yang berjudul ‘Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Pesisir dalam Pemilihan Presiden Tahun 2014 (studi masyarakat Desa Bonang Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang)’ menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat pesisir masih tergolong rendah dalam pemilihan presiden tahun 2014, yaitu hanya sebesar 45,7 %. Faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat pesisir adalah visi dan misi dari pasangan calon, masyarakat mencari tahu informasi sendiri, karakteristik dari paslon, serta faktor lingkungan dan keluarga. Dari keempat faktor yang disebutkan diatas yang paling mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah visi dan misi paslon yaitu sebesar 56,5%, sedangkan yang paling tidak mempengaruhi adalah faktor lingkungan dan keluarga, yaitu sebesar 32 % saja.

Penelitian yang dilakukan oleh Adriyus (2013) yang berjudul ‘Faktor-faktor yang mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Umum Legislatif 2009 di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi’ menyimpulkan bahwa ada dua faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum anggota legislatif 2009, yaitu faktor internal : tingkat pendidikan, tingkat ekonomi, kesadaran politik, ada juga faktor

eksternal : peran pemerintah, peran partai politik, peran media massa, perilaku kandidat yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Dari kedua faktor diatas dari faktor internal yang paling mempengaruhi adalah tingkat kesadaran politik dan dari faktor eksternal yang paling mempengaruhi adalah faktor perilaku kandidat calon anggota legislatif.

Penelitian yang berjudul ‘Partisipasi Politik Masyarakat dalam Memilih Calon Bupati Gowa pada Pilkada 2015 di Kabupaten Gowa’ oleh Muhammad Akbar (2016) memaparkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat Gowa masih terbilang rendah, hal ini menyebabkan partisipasi masyarakat Gowa terbilang aktif namun masyarakat harus melihat langsung dampak yang diberikan oleh paslon yang mencalonkan diri untuk masyarakat. Faktor yang paling mempengaruhi masyarakat adalah faktor psikologis baik itu secara internal maupun eksternal.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sondakh Gideon Repi (2016) yang berjudul ‘Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara 2015 (studi di Desa Koha Selatan Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa)’ menyimpulkan bahwa ada dua faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat, yaitu faktor penghambat dan faktor pendorong. Faktor penghambatnya adalah faktor dari pemerintah yang berkaitan dengan peraturan perundangan tentang masyarakat yang dapat mengikuti pemilihan umum, partai politik yang mengusung paslon maupun partai politik paslon sendiri. Faktor pendorongnya adalah media massa, dimana

media massa gencar memberikan informasi terkait pilgud, serta peran dari setiap kandidat yang mencalonkan diri.

Ade Aditia Armi (2014) dalam penelitiannya yang berjudul ‘Studi Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau pada Putaran Pertama di Kecamatan Pekanbaru Kota Tahun 2013’ memaparkan bahwa partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Gubernur tahun 2013 terbilang rendah, karena masyarakat yang menggunakan hak pilihnya hanya 43,77 %. Faktor rendahnya partisipasi masyarakat ini disebabkan oleh partisipasi pemilih pemula yang rendah, tingkat ketidakpercayaan kepada paslon gubernur, serta kurangnya ketelitian dari administrasi pemerintah dalam menentukan DPT (Daftar Pemilih Tetap).

Menurut DR. Suranto, Tunjung Sulaksono, M.Si, dan Awang Daru Murti, M.Si (2015), dalam penelitiannya yang berjudul ‘Pemetaan Faktor-faktor Partisipasi Pemilih Di Kabupaten Bantul’ ada dua faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat, yaitu faktor pendorong dan faktor penghambat partisipasi politik. faktor pendorong tingkat partisipasi politik, seperti a) Afiliasi politik dengan orang terdekat; b) Stimulus partisipasi; c) Kontrol sosial yang ketat; d) pragmatisme politik masyarakat yang terkoordinasi oleh lembaga RT/Dukuh sebagai mobilisasi masyarakat; e) Kelembagaan masyarakat yang memiliki peduli yang tinggi terhadap Pemilu. Sedangkan faktor penghambat partisipasi politik, ialah a) kejenuhan dan kurangnya manfaat secara langsung bagi masyarakat; b) kurangnya sosialisasi dan keterbatasan inovasi sosialisasi; c) kinerja pemutakhiran data oleh penyelenggara Pemilu belum optimal; d) luas

wilayah serta mobilitas penduduk yang tinggi menyebabkan pemutakhiran data menjadi isu yang krusial; e) kontrol sosial rendah; f) lebih mengutamakan pekerjaan.

Penelitian yang berjudul ‘Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Legislatif 2009 Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor’ oleh Ali Murdani (2011), memaparkan bahwa tingkat partisipasi pemilih pemula di Kecamatan Tanah Sareal sangat tinggi, faktor yang paling mempengaruhi pemilih pemula adalah faktor pendidikan politik, dan faktor yang tidak mempengaruhi adalah faktor media, faktor ekonomi, dan faktor nilai budaya remaja.

Dari beberapa literature review diatas penulis mendapat beberapa persamaan dan perbedaan pada penelitian yang telah dilakukan, persamaan penelitian yang akan penulis lakukan dan penelitian terdahulu ialah mencari tahu faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat, sedangkan perbedaan penelitian yang penulis lakukan adalah tingkat partisipasi masyarakat di perkotaan meningkat dan apa yang membuat itu terjadi di Kecamatan Tegalrejo.

F. Kerangka Dasar Teori

Kerangka dasar teori merupakan suatu teori yang relevan yang akan dipakai oleh peneliti untuk memberikan batasan tentang teori yang akan dipakai sebagai landasan dari penelitian. Menurut Sabari Hadi Yunus (2010: 226) dalam menyusun landasan teori ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu nama

pencipta teori, uraian ilmiah teori, tahun dan tempat pertama kali, relevansi teori dengan cara melakukan penelitian untuk mencapai tujuan dan target penelitian. Landasan teori yang akan digunakan oleh penulis adalah

1. Partisipasi Politik

Menurut beberapa ahli partisipasi politik dapat diartikan suatu kegiatan masyarakat baik individu maupun kelompok untuk ikut terlibat secara aktif dalam kegiatan politik, baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung Miaz (2012: 20).

Menurut Zuly Qodir (2016: 36-37) partisipasi politik merupakan proses dimana masyarakat mau dan mampu membagi pandangan mereka, untuk turut mempengaruhi dalam pengambilan keputusan dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Selain itu juga partisipasi politik merupakan sebuah bentuk yang nyata yang dapat membuktikan bahwa seseorang telah bersepan serta dalam sistem politik. Partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara yang tidak memiliki kewenangan (warga negara biasa) untuk turut dalam pembuatan dan pelaksanaan suatu keputusan politik yang akan mempengaruhi kehidupannya Ramlan Surbakti (2010: 140).

Menurut Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson dalam buku Dasar-dasar Ilmu Politik yang ditulis oleh Miriam Budihardjo (2008: 368-369) partisipasi politik merupakan sebuah tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan kebijakan, yang berupa kegiatan bukan sikap atau kepercayaan. Dari penjelasan diatas, partisipasi politik sudah jelas erat

kaitannya dengan kesadaran politik, yang mana kesadaran politik biasanya dipengaruhi oleh tingkat pendidikan.

Adapun tipologi atau pola partisipasi politik menurut A. Rahman (2007: 288) seperti berikut :

- a. Partisipasi aktif, yang dimaksud dengan partisipasi aktif adalah partisipasi yang berorientasi pada proses input dan out.
- b. Partisipasi Pasif, partisipasi yang hanya mengikuti output, seperti hanya mengikuti, menerima, dan menaati saja peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah.
- c. Golongan Putih (Golput) atau yang biasa disebut apatis, dimana sekelompok orang tidak ikut andil sama sekali terhadap sistem politik yang ada, yang disebabkan oleh kekecewaan terhadap sistem politik yang ada.

Menurut Indra J. Piliang dalam buku *Political Explore Sebuah Kajian Ilmu* yang ditulis oleh Efriza (2012: 545) memaparkan bahwa golput dianggap sebagai bentuk perlawanan atas partai politik dan kandidat yang mencalonkan diri, yang dinilai tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat yang kemudian memilih untuk golput. Golput dibagi menjadi 3 yaitu: 1). Golput Ideologis, yakni semua jenis penolakan sistem ketatanegaraan hari ini. Bagi golput jenis ini produk UU pemilu hanyalah bagian dari rekayasa sekelompok orang yang selama ini mendapatkan keistimewaan. Dan golput ini menilai bahwa demokrasi yang berlangsung dalam wilayah semu dan abu-abu; 2). Golput Pragmatis, yaitu golput yang didasari oleh kalkulasi, apakah dalam pemilihan

tersebut akan menguntungkan si pemilih atau tidak. Sikap golput jenis ini yakni setengah-setengah dalam pemilihan, antara percaya dan tidak percaya; 3). Golput Politis, merupakan golput yang dilakukan akibat pilihan-pilihan politik. Kelompok ini masih percaya kepada Negara, juga masih percaya pemilu hanya saja memilih golput karena pilihan politiknya berubah atau akibat sistemnya yang dirasa merugikan.

Ada tiga alasan mengapa masyarakat mau ikut andil untuk partisipasi khususnya dalam partisipasi politik, yaitu a. Berkomunikasi kepada pemegang kekuasaan tentang tuntutan dan aspirasi; b. Untuk lebih memantapkan upaya pencapaian tujuan dari sistem politik yang ada; c. Untuk menunjukkan dukungan kepada para elit politik serta sistem politik yang ada.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik

Tingkat partisipasi politik seseorang, baik rendah maupun tinggi pasti dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu yang menggugah masyarakat untuk melakukan sesuatu dalam kegiatan politik.

Menurut Surbakti (2006: 144) ada dua faktor penting yang mempengaruhi partisipasi ialah a. Kesadaran politik, masyarakat yang memiliki kesadaran politik biasanya masyarakat yang sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, terhadap lingkungan politik di tempat ia hidup; b. Kepercayaan terhadap pemerintah, merupakan suatu penilaian seseorang terhadap kinerja dari pemerintah. Selain itu juga ada faktor yang mempengaruhi partisipasi politik adalah seseorang yang mempunyai status ekonomi dan sosial yang tinggi

biasanya memiliki minat dan perhatian politik, dan mempunyai kepercayaan kepada pemerintah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi politik menurut Efriza (2012: 540) yaitu *pertama* kinerja pemerintah atau peran pemerintah, yang mana kinerja pemerintah dapat diukur dari seberapa kebutuhan rakyat akan pelayanan publik terpenuhi dan pemerintah dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik. *Kedua* citra kandidat dapat diukur dari kualitas kandidat, jenjang karir, latar belakang kandidat, serta prestasi atau penghargaan yang pernah diraih oleh kandidat. Hal tersebut dapat menjadi pertimbangan bagi masyarakat dalam memilih.

Menurut Agus Yusoff dan Andi Yusran (2007: 94-95) faktor yang dominan mempengaruhi partisipasi politik adalah faktor ideologis masyarakat, yang termasuk dalam faktor ideologis ialah status sosial, jenis kelamin, tingkat pendidikan, serta status dan situasi politik (peranan partai politik dan pengaruh ideologi serta kelompok kepentingan dalam sosialisasi dan komunikasi politik).

Menurut Milbrath dalam buku pengantar sosiologi politik yang ditulis oleh Michael Rush dan Philip Althoff (2011: 165-168) memaparkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi atau mendorong seseorang untuk berpartisipasi politik, seperti:

- a. Faktor karakteristik sosial pribadi seseorang

Karakteristik sosial seseorang dapat terlihat dari status ekonomi, usia, jenis kelamin, suku dan agama (keyakinan). Biasanya karakteristik seseorang yang paling relatif mempengaruhi tingkat partisipasi politik.

b. Penerimaan perangsang politik

Dengan adanya rangsangan politik biasanya seseorang mau berpartisipasi dalam kehidupan politik. Hal yang dapat merangsang politik misalnya dengan cara mengikuti diskusi baik secara formal maupun melalui media massa.

c. Perbedaan regional

Perbedaan regional adalah faktor yang membuat perbedaan tingkah laku dan watak seseorang. Karena adanya perbedaan tersebut maka berpengaruh juga terhadap tingkat partisipasi politik dan perilaku politik.

d. Sifat dari sistem partai di tempat seseorang tinggal

Seseorang yang hidup di negara demokrasi, biasanya partai-partai politik mencari dukungan masyarakat dan memperjuangkan kepentingan masyarakat. Sehingga masyarakat cenderung berpartisipasi dalam politik.

Selanjutnya menurut Myron Weiner dalam Mas'ood dan MacAndrews (2011: 56-57) terdapat lima yang mempengaruhi seseorang untuk berpartisipasi politik, seperti :

1). Modernisasi

Modernisasi di semua bidang yang akan berdampak pada industrial, pertanian, kemampuan baca tulis, perbaikan pendidikan dan pengembangan media komunikasi dan media massa secara luas.

2). Perubahan struktur kelas sosial

Suatu kelas terbentuk selama proses industrialisasi dan modernisasi, yang mana hal ini mempengaruhi siapa yang berhak berpartisipasi dalam pembuatan keputusan politik. dan hal ini menyebabkan perubahan pola partisipasi politik.

3). Pengaruh kaum intelektual dan komunikasi massa modern

Sistem komunikasi modern dan transportasi memudahkan kaum intelektual dalam memberikan informasi dan mengemukakan ide-ide kepada masyarakat yang membangkitkan tuntutan partisipasi massa dalam membuat keputusan politik.

4). Konflik diantara pemimpin-pemimpin politik

Pemimpin politik yang bersaing untuk mendapatkan kekuasaan biasanya mencari dukungan massa untuk mencapai kemenangannya.

5). Keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi, dan kebudayaan

Meluasnya ruang lingkup pemerintah ini sering memancing tuntutan organisasi untuk ikut andil dalam pembuatan keputusan.

3. Pilkada

Seiring dengan berubahnya keadaan politik yang pada awalnya sentralistik bergeser ke desentralistik yang dikenal dengan otonomi daerah. Hal ini yang menyebabkan dilaksanakannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Di Indonesia sendiri, pertama dilaksanakannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada tahun 2005. Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 2015 dalam pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa ‘Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur, Bupati dan Walikota’. Menurut Idil Akbar (2016) Pilkada merupakan sarana bagi masyarakat untuk memilih pemimpin terbaik bagi daerahnya, yang nantinya akan mampu mewujudkan aspirasi masyarakat melalui kebijakan-kebijakan yang pro masyarakat daerah tersebut. Pilkada juga merupakan bentuk rekrutmen pemimpin lokal.

Dalam Undang-undang No. 10 Tahun 2008 pasal 4 menyebutkan bahwa pemilihan umum diadakan sekali dalam lima tahun yang dilaksanakan secara demokratis secara langsung, umum, bebas, jujur, rahasia, dan adil.

a. Langsung

Rakyat yang berada di daerah sebagai pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya tanpa perantara.

b. Umum

Seluruh masyarakat berhak menggunakan hak pilihnya, tanpa memandang perbedaan yang ada.

c. Bebas

Warga negara bebas memberikan suaranya tanpa adanya paksaan atau diskriminasi dari pihak manapun.

d. Jujur

Panitia pelaksanaan pemilihan harus bersikap sejujur-jujurnya sesuai dengan peraturan erundangan yang ada.

e. Rahasia

Bersifat rahasia yang dimaksud adalah dimana para pemilih dijamin pilihannya tidak diketahui oleh siapapun.

f. Adil

Panitia penyelenggara pemilihan harus bertindak adil kepada pemilih tanpa memandang status ekonomi maupun sosial.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) memiliki beberapa fungsi penting dalam melaksanakan pemerintahan daerah, yaitu : a). Memilih kepala daerah yang dapat memahami masyarakat daerah tersebut; b). Melalui Pilkada diharapkan masyarakat memilih berdasarkan visi dan misi, serta program yang akan dilaksanakan kepala daerah selama masa jabatan; c). Dengan adanya Pilkada maka masyarakat dapat melakukan kontrol dan evaluasi politik terhadap kepala daerah.

G. Definisi Konseptual

1. Partisipasi Politik

Partisipasi politik masyarakat adalah kegiatan individu atau kelompok secara aktif untuk ikut serta dalam kehidupan politik, dalam hal ini dengan cara memberi suara dalam pemilihan umum, baik berpartisipasi secara langsung maupun secara tidak langsung dan turut mempengaruhi kebijakan.

2. Pilkada

Pilkada merupakan bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat lokal untuk memilih pemimpin daerahnya yang dilakukan secara langsung, bebas, umum, adil, jujur dan rahasia.

H. Definisi Operasional

Dalam definisi operasional akan dijelaskan tentang faktor-faktor dalam obyek penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat Kecamatan Tegalorejo dalam pemilihan Walikota Kota Yogyakarta tahun 2017 . Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikaji faktor-faktor sebagai berikut:

- 1). Faktor karakteristik sosial pribadi seseorang
 - a). Diukur berdasarkan status ekonomi pemilih
 - b). Diukur berdasarkan usia pemilih

- c). Dapat diukur berdasarkan jenis kelamin pemilih
- 2). Penerimaan perangsang politik
- a). Dengan cara mengikuti sosialisasi mengenai pemilihan kepala daerah (Pilkada)
 - b). *Money politic* (Politik Uang)
- 3). Sifat dari sistem partai di tempat seseorang tinggal
- a). Partai mayoritas yang menguasai wilayah tersebut
- 4). Citra Kandidat
- a). Dapat diukur dari jenjang karir
 - b). Dapat dilihat dari prestasi atau penghargaan yang didapat
 - c). Dapat diukur dari latar belakang kandidat
- 5). Pengaruh kaum intelektual dan Komunikasi massa modern
- a). Dapat diukur dari penggunaan media sosial dalam Pilwali

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2017: 8) adalah penelitian naturalistik sebab penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*). Metode deskriptif merupakan metode yang

menggambarkan keadaan subyek atau obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) berdasarkan fakta-fakta yang nampak terlihat atau sebagaimana adanya bukan merupakan tafsiran peneliti. Metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan suatu realita, gejala dan fakta J.R.Raco (2010: 50).

Alasan peneliti memilih metode kualitatif karena metode kualitatif mempunyai teori pendekatan langsung yang dapat mendukung untuk menganalisa atau mengetahui apasaja faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat Kecamatan Tegalrejo dalam Pemilihan Walikota Kota Yogyakarta tahun 2017, karena pilkada tahun 2017 mengalami peningkatan tingkat partisipasinya dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

2. Unit Analisa

Unit analisa penelitian merupakan satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian Arikunto (2010: 187). Data biasanya berkenaan dengan masalah, sedangkan masalah dipresentasikan oleh variabel penelitian. Oleh sebab itu jika ingin mendapatkan data berarti peneliti harus mengobservasi variabel yang merupakan representasi dari masalah yang ada. Masalah penelitian adalah objek yang mana akan menjadi objek penelitian. Fenomena atau masalah yang telah diabstraksi menjadi suatu konsep atau variabel disebut juga objek penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Masyarakat Kecamatan Tegalrejo dan KPUD Kota Yogyakarta beserta jajarannya.

3. Jenis Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan ada dua macam yaitu:

- a. Data primer adalah data dalam bentuk kata-kata yang diucapkan secara lisan atau secara langsung, dan perilaku yang dilakukan oleh subjek menurut Arikunto (2010: 22). Dalam penelitian ini data primer yang diperoleh berupa hasil wawancara yang akan dilakukan kepada masyarakat Kecamatan Tegalorejo yang menggunakan hak pilihnya dan KPUD Kota Yogyakarta beserta jajarannya.
- b. Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung, misalnya lewat dokumen, buku-buku literature, dan internet, yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara yang mengajukan pertanyaan kepada yang narasumber atau responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam. Dalam penelitian ini dilakukan wawancara untuk mencari informasi terkait faktor yang mempengaruhi partisipasi politik dalam Pemilihan Walikota (Pilwali) tahun 2017 di Kota Yogyakarta khususnya di

Kecamatan Tegalrejo. Adapun pengumpulan datanya berupa pedoman wawancara yang terstruktur. Narasumber dari wawancara ini adalah Masyarakat Kecamatan Tegalrejo yang menggunakan hak pilihnya, peneliti memilih masyarakat yang menggunakan hak pilihnya sebab peneliti ingin mengetahui faktor yang mempengaruhi masyarakat tersebut sehingga tingkat partisipasi dalam Pilwali Tahun 2017 meningkat dan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Yogyakarta beserta jajarannya, alasan peneliti memilih KPUD Kota Yogyakarta beserta jajarannya sebagai informan, karena peneliti ingin mengetahui apa saja yang dilakukan KPUD Kota Yogyakarta beserta jajarannya untuk meningkatkan partisipasi politik di Kecamatan Tegalrejo dan mengenai data terkait Pilwali Tahun 2017.

b. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang secara tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian, dokumentasi dapat berupa otobiografi, catatan harian, surat, artikel, surat kabar, buku, dan laporan yang berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Tegalrejo, sehingga dapat dijadikan sumber data yang diperlukan pada penelitian ini. Adapun dokumentasi yang peneliti maksud adalah berupa data-data dokumen terkait Pemilihan Walikota (Pilwali) Tahun 2017. Berikut beberapa dokumen yang dibutuhkan:

1. Hasil perolehan suara secara keseluruhan di Kecamatan Tegalrejo.

2. Hasil Perolehan suara di tiap TPS yang ada di Kecamatan Tegarrejo.

5. Teknik Analisa Data

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis data model alir (*flow model*) dari Huberman dan Miles dalam buku yang ditulis oleh Agus Salim (2006: 22) dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Reduksi data

Data yang dihasilkan dari wawancara dan dokumentasi merupakan data yang masih kompleks. Untuk itu, perlu dilakukan pemilihan data yang relevan dan bermakna. Pemilihan tersebut dilakukan dengan memilih data yang mengarah pada perumusan masalah sehingga mampu menjawab permasalahan yang diteliti.

b. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dengan melihat gambaran data yang diperoleh selama penelitian. Pada tahap ini, penyajian data yang telah direduksi dan dipaparkan dalam bentuk narasi, yang berupa informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

c. Pengambilan kesimpulan

Data yang diperoleh dianalisis dari hal-hal yang bersifat khusus untuk memperoleh kesimpulan yang obyektif. Kesimpulan

tersebut kemudian diverifikasi dengan melihat kembali reduksi data dan display data, sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari permasalahan penelitian.